

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengendalikan inflasi, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Todaro (2006) adapun komponen dasar yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu tujuan utama yang harus dicapai setiap warga negara seperti jati diri (*self-esteem*), kecukupan (*sustenance*) dan kebebasan (*freedom*).

Pembangunan ekonomi seringkali diartikan sebagai usaha dalam mencapai kesejahteraan negara yang biasanya dilihat dari besar kecilnya pendapatan riil per kapita suatu negara (Suparmoko dan Irawan, 1992). Tetapi saat ini pembangunan ekonomi di Indonesia masih memiliki masalah dalam hal ketidakrataan distribusi pendapatan. Selain itu adapun masalah lain yang sedang dihadapi oleh negara berkembang yaitu jumlah pengangguran yang semakin meningkat.

Meningkatnya pengangguran dikarenakan jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Hal lain yang menyebabkan pengangguran juga seperti pencari kerja yang saat ini minim keterampilannya. Masalah tersebut biasanya terjadi pada daerah seperti Kabupaten Ponorogo. Terjadi pengangguran terbuka di Kabupaten Ponorogo disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang membuat pekerja migran tidak dapat berangkat

bekerja. Dimana Ponorogo merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan satu kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI).

TABEL 1. 1

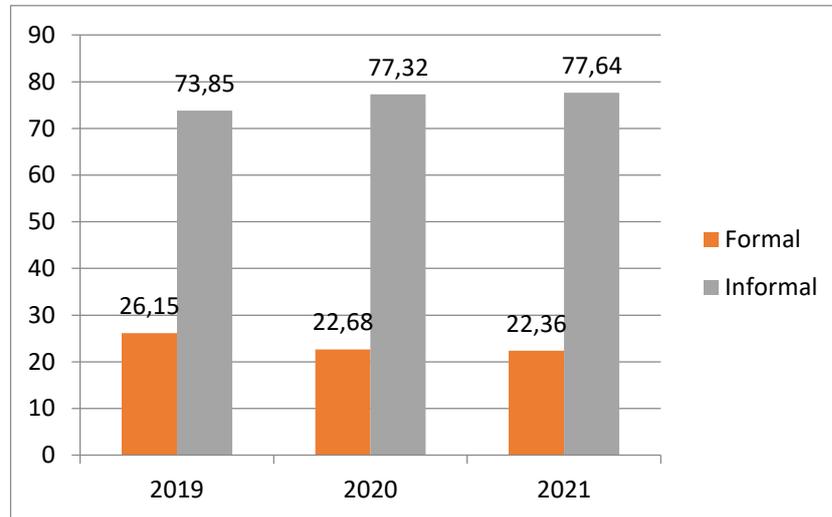
Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama

Jenis Kegiatan Utama	Agustus 2020 (Ribu Orang)	Agustus 2021 (Ribu Orang)
Penduduk Usia Kerja	718,4	721,3
Angkatan Kerja	513,8	523,9
Bekerja	491,1	500,9
Pengangguran	22,9	22,9
Bukan Angkatan Kerja	204,7	197,4
Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	4,45	4,38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK (%)	71,51	72,63

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021

Dilihat dari tabel 1.1 jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Ponorogo pada bulan Agustus 2020 sebanyak 718,4 ribu orang mengalami kenaikan sebesar 2,9 ribu orang menjadi 721,3 ribu orang. Dari jumlah penduduk usia kerja pada bulan Agustus 2021 sebanyak 523,9 ribu orang merupakan angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Agustus 2021 sebanyak 500,9 ribu orang dan sebanyak 22,9 ribu orang merupakan pengangguran. Dengan kenaikan angkatan kerja membuat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus 2020 TPAK di Kabupaten Ponorogo sebesar 71,51 persen mengalami peningkatan sebesar 1,12 persen menjadi 72,63 persen. Salah satu penyebab pengangguran yaitu kurang tersedianya lowongan pekerjaan di sektor formal, sehingga sektor informal menjadi alternatif

dalam mengurangi tingkat pengangguran. Sektor informal diyakini mampu membuat terciptanya lapangan pekerjaan untuk menggantikan sektor formal.



Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021

GAMBAR 1. 1

Persentase Penduduk yang Bekerja di Sektor Formal dan Informal

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa pekerja di Kabupaten Ponorogo didominasi pada sektor informal. Dari tahun 2019 sampai 2021 persentase pekerja di sektor informal semakin meningkat dimana di tahun 2019 sebesar 73,85 persen penduduk bekerja di sektor informal dan tahun 2021 meningkat sebesar 3,79 persen menjadi 77,64 persen. Dibandingkan dengan pekerja di sektor formal dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan sebesar 3,79 persen di tahun 2019 sebesar 26,15 persen penduduk yang bekerja di sektor formal menurun menjadi 22,36 persen.

Dalam ajaran islam Allah SWT mewajibkan umat muslim untuk berusaha bekerja. Bekerja adalah salah satu usaha yang dilakukan manusia untuk mencari nafkah (rezeki). Allah menciptakan bumi yang luas dan dengan isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki dimana firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ضَرًّا لَّا أَفَامُشُوا فِي مَنَآكِبِهِ أَوْ كَلُوا مِنْ رِزْقِهِ^{١٥}

وَالَّذِي النَّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makankah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S Al-Mulk ayat 15)

Dari penjelasan ayat diatas manusia dituntut untuk dapat bertanggungjawab dalam mencari rezekinya yang sesuai dengan syariat islam. Manusia berusaha bekerja untuk mengharapkan agar mendapatkan penghasilan dimana jika pendapatan seseorang semakin tinggi maka kesejahteraan yang diperoleh juga semakin tinggi, sehingga manusia berusaha semaksimal mungkin bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan manusia dapat bekerja di sektor informal seperti berbisnis dan berdagang. Oleh krena itu pemerintah di harapkan untuk memberi perhatian khusus terhadap sektor informal agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru sehingga dapat terjadi pemerataan pembangunan.

Salah satu contoh sektor informal yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan dukungan semua orang termasuk pemerintah agar UMKM dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu, saat ini pemerintah telah memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperluas pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut dikarenakan sektor informal seperti UMKM dapat mengatasi masalah pemerintah dalam kurangnya lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran menurun. UMKM

mampu menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan serta mengatasi kurangnya sektor formal bagi masyarakat yang dapat memberikan kontribusi pada ekonomi dalam mempercepat perubahan struktural sehingga meningkatkan perekonomian nasional.

Dalam pengembangan UMKM pemerintah di Indonesia telah melakukan berbagai program kegiatan di pusat maupun di daerah seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimana pemerintah pusat dan daerah bersama-sama memberdayakan dan mengembangkan UMKM yang ada di daerahnya masing-masing. Menurut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 yang berisi tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dimana pengembangan UMKM dapat berupa menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dan melakukan pengembangan usaha yang dijalankan. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga dapat membantu UMKM berkembang dan tumbuh agar UMKM dapat berkontribusi dengan baik.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 3 sektor yaitu sektor perdagangan dan reparasi, sektor industri dan sektor jasa. Menurut data Pemerintah Kabupaten Ponorogo, jumlah perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo sebanyak 1.826 unit UMKM mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 2.839 unit UMKM. Sedangkan untuk tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten

Ponorogo meningkat menjadi 5.080 unit UMKM (DPMPTSP Kabupaten Ponorogo, 2020). Berdasarkan data dapat dilihat bahwa UMKM di Kabupaten Ponorogo mempunyai harapan dapat berkembang dengan pesat, sehingga tidak salah jika Ponorogo mempunyai daya beli yang tinggi.

Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Ponorogo tahun 2020 pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Diketahui pada tahun 2018 pendapatan UMKM di Kabupaten Ponorogo meningkat sebesar 24,5 Milyar tiap tahun, kemudian tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 124,4 Milyar tiap tahun. Tahun 2020 juga meningkat sebesar 372,8 Milyar tiap tahun. Hal tersebut disebabkan oleh *supply* dan *demand* konsumen yang terus meningkat. Oleh karena itu, para pelaku UMKM perlu mempunyai strategi dalam menghadapi persaingan dengan para pesaing agar dapat memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Pemerintah dapat memberikan pendampingan untuk UMKM agar usaha yang dijalankan dapat memproduksi dengan maksimal dan efisien. Usaha lain yang dapat dilakukan para pelaku UMKM yaitu mencari tahu beberapa indikator yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan UMKM agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan pendapatannya.

Berikut indikator-indikator yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) jika dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Angraini (2013) diketahui bahwa faktor modal kredit dapat mempengaruhi pendapatan UMKM dikarenakan semakin besar pelaku UMKM mengambil modal dalam bentuk kredit maka akan semakin besar juga pendapatan

yang diperlukan dimana jika pelaku UMKM memiliki modal yang banyak maka jumlah barang yang diproduksi juga meningkat menyebabkan pendapatan yang diperoleh juga meningkat. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Saskara (2013) dan Lastina (2018) dimana penggunaan kredit dapat digunakan untuk menambah jumlah modal yang diperlukan dan untuk mengembangkan serta memperluas usahanya sehingga pendapatan yang didapatkan akan semakin tinggi.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pendapatan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) yaitu modal sendiri karena modal mempunyai peran yang cukup penting dalam proses produksi. Hal tersebut dikarenakan modal digunakan para pelaku usaha dalam mendirikan usahanya yang baru dan untuk memperluas usaha yang sudah berjalan. Suatu usaha tanpa adanya modal maka tidak dapat berjalan apalagi jika modal yang diperlukan tidak cukup maka akan mempengaruhi kelancaran usahanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa modal yang cukup dapat mempengaruhi pendapatan UMKM seperti penelitian yang dilakukan oleh Artini (2019). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Lestari (2020) bahwa usaha yang besar akan membutuhkan modal yang besar juga karena pengembangan usaha untuk mencapai usaha yang besar membutuhkan modal yang besar. Jadi dengan jumlah modal yang besar akan memberikan kelancaran usaha yang dijalankan sehingga akhirnya dapat memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu lama usaha. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2019) mengatakan bahwa lama usaha mempunyai

pengaruh terhadap pendapatan UMKM. Hal tersebut disebabkan lama usaha menunjukkan jangka waktu usaha yang dijalankan karena semakin lama usaha yang dijalankan maka menunjukkan semakin baik dan berkembangnya usaha tersebut. Selain itu didukung juga dengan penelitian dari Gesmani (2011) yang menunjukkan bahwa lama usaha mempunyai pengaruh terhadap pendapatan usaha kecil karena lamanya usaha yang dijalankan menunjukkan pengalaman usaha yang didapatkan. Semakin banyak pengalaman yang didapatkan maka menunjukkan pengusaha tersebut sudah banyak mengetahui karakter dari konsumennya sehingga pengusaha dapat lebih mengetahui cara untuk menawarkan dagangannya dengan baik agar dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh.

Adapun penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seperti yang dilakukan oleh Yusuf & Indriani (2020) menyatakan bahwa variabel modal kredit berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM dan hasil penelitian Lestari (2020) bahwa modal kredit berpengaruh negatif terhadap pendapatan UMKM. Sedangkan faktor modal sendiri berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM yang sesuai dengan penelitian Laili dan Setiawan (2020) dan Kolanus, dkk (2021). Berdasarkan hasil penelitian Butarbutar (2017) menyatakan bahwa variabel lama usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap pendapatan UMKM.

Kesimpulan dari hasil pemaparan beberapa penelitian diatas, maka untuk mengukur faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat banyak dan sudah dibuktikan dengan

penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelum-sebelumnya. Dari sekian banyak peneliti sebelumnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM, kemudian peneliti mengembangkan dan menambah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan UMKM serta memperluas ruang lingkup dimana peneliti mengambil UMKM yang diberikan kredit Badan Kredit Desa (BKD) Sampung Kabupaten Ponorogo.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Ponorogo karena di Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang mempunyai potensi jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat semakin banyaknya jumlah UMKM tiap tahunnya di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini peneliti melakukan fokus penelitian pada UMKM di sektor usaha mikro selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pada penelitian ini karena selama peneliti melakukan riset belum terdapat penelitian mengenai Usaha mikro yang menggunakan modal kredit dari Bank Kredit Desa (BKD) Sampung untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan Usaha Mikro.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Penerima Dana Kredit di Badan Kredit Desa (BKD) Sampung Kabupaten Ponorogo”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan-batasan permasalahan sebagai berikut yaitu:

1. Penelitian ini hanya ditujukan kepada Usaha Mikro yang menerima Kredit di Bank Kredit Desa (BKD) Sampung.
2. Wilayah yang digunakan dalam penelitian ini hanya wilayah Kabupaten Ponorogo.
3. Penelitian ini hanya menggunakan empat faktor yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro penerima dana Kredit Bank Kredit Desa (BKD) Sampung di Kabupaten Ponorogo yaitu Jam Kerja, Lama Usaha, Modal Awal dan Kredit.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang yang sudah dipaparkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Jam Kerja terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro penerima dana Kredit di Bank Badan Kredit Desa (BKD) Sampung Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh Lama Usaha terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro penerima dana Kredit di Bank Kredit Desa (BKD) Sampung Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh Modal terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro penerima dana Kredit di Bank Kredit Desa (BKD) Sampung Kabupaten Ponorogo?
4. Bagaimana pengaruh Kredit terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro penerima dana Kredit di Bank Kredit Desa (BKD) Sampung Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Jam Kerja terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro penerima dana Kredit di Bank Kredit Desa (BKD) Sampung Kabupaten Ponorogo?
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Lama Usaha terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro penerima dana Kredit di Bank Kredit Desa (BKD) Sampung Kabupaten Ponorogo?
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Modal terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro penerima dana Kredit di Bank Kredit Desa (BKD) Sampung Kabupaten Ponorogo?
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Kredit terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro penerima dana Kredit di Bank Kredit Desa (BKD) Sampung Kabupaten Ponorogo?

E. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang keilmuan terutama mengenai teori pendapatan. Serta menambah referensi bagi penelitian lain yang terkait dengan teori pendapatan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam upaya pengembangan industri Usaha Mikro di Wilayah Kabupaten Ponorogo.

3. Manfaat Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.